

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. *Agency Theory*

Konsep *agency theory* menurut Achmad (2012) teori agensi mengansumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Teori keagenan menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda. Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. *Teory agency* adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent* dimana diasumsikan bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dalam teori *agency*, yang disebut *principal* adalah pemegang saham sementara *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. *Principal* diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka pada perusahaan. Sedangkan, *agent* diasumsikan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan lain yang terlibat dalam hubungan *agency*.

Manajer perusahaan merupakan pihak yang lebih banyak mengetahui informasi internal perusahaan karena manajer perusahaan berhubungan langsung dengan perusahaan. Dengan informasi yang dimilikinya ini, manajer perusahaan dapat untuk memanipulasi pelaporan keuangan untuk memaksimalkan kepentingannya. Konflik akan terjadi apabila usaha manajer untuk memaksimalkan kepentingannya tetapi tidak untuk memaksimumkan kepentingan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Dengan adanya konflik kepentingan ini, pihak pemilik akan mengeluarkan biaya keagenan (*agency cost*) untuk mengawasi perilaku agen.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa masing-masing individu mengutamakan kepentingan sendiri. Manajer sebagai *agent* akan bertindak mengutamakan kepentingan pribadinya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham atau *stakeholders* lainnya. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya konflik dalam hubungan keduanya. Salah satu contoh konflik tersebut adalah pengungkapan informasi. Manajer mempunyai diskresi untuk menentukan informasi mana yang akan disebar dan diungkapkan kepada pihak luar (termasuk pemegang saham) dan yang disimpan. Ketidakseimbangan perolehan informasi antara manajer dan *stakeholders* ini disebut dengan *information asymmetry*.

Menurut Scott (2012) terdapat dua jenis asimetri informasi, yakni:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam perusahaan (*insiders*) biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan pihak luar. Dan informasi yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tidak disampaikan oleh manajer.
2. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan manajer tidak seluruhnya diketahui oleh *stakeholders*. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan *stakeholders* yang melanggar perjanjian diantara mereka dan secara etika tidak layak dilakukan.

Terdapat dua konflik keagenan yang sering muncul, yaitu:

1. Konflik antara pemegang saham dan manajer

Brigham & Houston (2006) menyatakan bahwa dengan menciptakan perusahaan yang besar dan tumbuh dengan pesat, para manajer akan mendapatkan jaminan bahwa jabatannya tidak akan terganggu, status dan insentifnya akan meningkat, serta kesempatan untuk berkreasi bagi manajer pada level bawah dan menengah juga semakin meningkat. Hal ini membuat tujuan manajer bergeser dari memaksimalkan kemakmuran pemegang saham menjadi memaksimalkan profitabilitas perusahaan. adanya konflik ini menuntut pemegang saham untuk melakukan tindakan

yang memastikan bahwa manajer bertindak konsisten dengan tujuan pemegang saham. Hal ini menyebabkan munculnya biaya keagenan (*agency costs*).

2. Konflik antara pemegang saham dan kreditur

Untuk menjalankan proyek perusahaan, pemegang saham melalui manajer mengajukan pinjaman modal kepada kreditur. Hal ini menyebabkan terjadinya hubungan kontraktual diantara keduanya. Dalam penetapan jumlah dan bunga, kreditur mendasarkannya pada tingkat risiko. Seorang manajer dapat melakukan tindakan yang memiliki risiko lebih tinggi dari pada yang telah ditetapkan oleh kreditur.

2.1.1. *Signaling Theory*

Menurut Brigham dan Houston (2008) isyarat atau *signal* adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan, *Signalling theory* menekankan kepada pentingnya informasi lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan bagi keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran tentang keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan mengenai pasaran efeknya.

Menurut Devi *et. al.* (2016) Informasi-informasi berupa informasi *financial* dan informasi *nonfinancial* yang terdapat pada laporan tahunan dapat dijadikan sebagai *signal* kepada pihak di luar perusahaan. Pelaku pasar modal akan melakukan analisis terhadap informasi yang diumumkan oleh perusahaan sebagai *signal* baik (*good news*) atau *signal* buruk (*bad news*). Perusahaan yang mengharapkan agar saham perusahaan diminati dan dibeli oleh investor dapat

menggunakan strategi pengungkapan pada laporan tahunan secara terbuka dan transparan untuk menarik minat investasi para investor. Investor sangat memerlukan informasi-informasi privat tersebut sebagai dasar untuk memutuskan diversifikasi portofolio dan kombinasi investasi dengan preferensi risiko yang diinginkan. Manajemen akan berupaya untuk memberikan informasi privat apabila informasi tersebut sangat diminati oleh para investor karena volume perdagangan saham akan dapat meningkat jika informasi yang diumumkan tersebut adalah berupa *good news* bagi investor

2.1.2 Risiko

Risiko tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan selalu melekat pada segi operasional maupun finansial diperusahaan manapun. Dengan ketidakpastiannya risiko, risiko akan selalu ada apabila yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang belum diketahui dengan pasti dan selalu melekat dalam aspek kehidupan setiap manusia. Menurut Charette n.d risiko didefinisikan antara lain sebagai kejadian dimasa yang akan datang, melibatkan perubahan dan pilihan serta ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan. Semakin kompleksnya bisnis dan kegiatan usaha, perusahaan dihadapkan pilihan bahwa mereka memang harus membentuk suatu komite yang dapat mengelola dan menangani risiko atas kegiatan usaha secara tepat dan mampu melakukan pemahaman yang lebih baik terhadap risiko sehingga dapat menentukan prioritas strategi dan program dalam pencapaian tujuan organisasi. (Yatim, 2009).

2.1.3 Manajemen Risiko

Risiko ini dapat dihilangkan dengan memberi perhatian lebih serta penelusuran yang mendalam terhadap risiko yang akan terjadi dimasa mendatang. Kesadaran yang tinggi terhadap manajemen risiko sebagian besar sebagai akibat dari beberapa bencana yang dihadapi perusahaan dan kegagalan bisnis yang tidak diharapkan (Walker, *et al* dalam Yatim , 2009). Manajemen risiko yang dirancang lebih spesifik dengan tujuan untuk lebih mengenali potensi risiko yang sangat mungkin terjadi karena kompleksitas didalam perusahaan menjadikan

cukup beratnya tugas dari Dewan Komisaris. (Setyarini , 2011). Tahun 2004 COSO menerbitkan *Entreprise Risk Management-Integrated Framework* yang menggambarkan komponen-komponen penting, prinsip, dan konsep dari manajemen risiko perusahaan untuk seluruh organisasi tanpa memandang ukuran perusahaan. Menurut Sukamto (n.d) inti dari manajemen risiko *entreprise* adalah bahwa setiap entitas yang ada mempunyai nilai untuk *stakeholders*. Semua entitas selalu menghadapi ketidakpastian dan yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengelola, mengidentifikasi seberapa besar kemungkinan ketidakpastian yang mungkin diterima untuk meningkatkan nilai *stakeholder*. Ketidak pastian merepresentasikan risiko dan peluang dimana memiliki potensi untuk mengikis atau mengubah nilai. Manajemen risiko *entreprise* membuat pengelolaan ketidakpastian menjadi lebih efektif terkait dengan risiko dan peluang dengan tujuan mempertinggi nilai. Oleh karenanya, struktur manajemen risiko yang tepat dapat membantu mengelola risiko bisnis lebih efektif dan mengungkapkan hasil manajemen risiko kepada *stakeholder* organisasi (Subramaniam *et al* , 2009).

2.1.4 Good Corporate Governance

Good Corporate governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI). *Corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya. Oleh karena itu, pengembangan *corporate governance* dapat diasumsikan akan menambah nilai perusahaan dan dapat meningkatkan efektifitas kinerja perusahaan yang dalam jangka panjang juga akan menguntungkan para pemegang saham. Hastuti (2005) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sistem yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada

stakeholders, termasuk di dalamnya adalah *shareholders*, *lenders*, *employees*, *executives*, *government*, *customers* dan *stakeholders* lainnya.

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance*, (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Konsep *good corporate governance* baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep *good corporate governance* baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi),
yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan
2. *Accountability* (akuntabilitas),
yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban),
yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan berlaku
4. *Independency* (kemandirian),
yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak

sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), tugas utama dewan komisaris adalah:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan *corporate governance* dan mengadakan perubahan bilamana perlu.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi di dalam perusahaan.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* terdapat dua sistem manajemen yang berbeda yang membedakan mekanisme pengawasan yang

dilakukan oleh dewan komisaris. *One tier system* atau sistem satu tingkat banyak dianut oleh negara yang cenderung mengikuti hukum *anglo-saxon (common law)*, sedangkan *two tier system* atau sistem dua tingkat banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa dan negara-negara lain yang menganut *civil law*, termasuk Indonesia. Dalam *one-tier system*, peran dewan komisaris (pengawas) dan peran dewan direksi (pelaksana/eksekutif) dijadikan dalam satu kesatuan dan disebut *Board of Director*. Penyatuan ini membuat tidak jelasnya peran dari pengawas dan pelaksana. Sedangkan di dalam *two-tier system*, peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan komisaris akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh dewan direksi.

Dalam *two tier system* sangat jelas ada perbedaan antara fungsi pengambilan dan pelaksanaa kebijakan dengan fungsi pengawasan. Fungsi pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya dijalankan oleh dewan direksi. Sedangkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh dewan direksi dilakukan oleh dewan komisaris. Berbeda dengan *one tier system* yang tidak jelas siapa yang menjalankan fungsi pengawasan. Dewan Komisaris dapat membentuk suatu komite untuk membantu menyelesaikan tugas-tugasnya yang luas sehingga dapat selesai dengan efektif dan tepat.

2.1.5 Risk Management Committee (RMC)

Saat ini, keberadaan RMC dirasa sebagai sebuah pengawasan penting komite dewan (Fields and Keys dalam Subramaniam, et al., 2009). Secara umum, luas area tanggung jawab dari RMC adalah:

1. Menentukan strategi manajemen resiko organisasi;
2. Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi;
3. Menilai pelaporan keuangan organisasi;
4. Memastikan bahwa organisasi patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Komite manajemen risiko (RMC) adalah komite yang dibentuk oleh dewan direksi. RMC bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan membantu mereka

dalam seluruh aspek pengawasan manajemen risiko perusahaan (Alijoyo dan Zaini, 2004). Tujuan pembentukan komite ini untuk membantu dewan direksi mengelola risiko, menetapkan kebijakan risiko yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh perusahaan. Selain itu RMC juga bertugas untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengawasi, dan mengelola risiko yang dihadapi perusahaan meskipun tanggung jawab atas pengelolaan risiko berada di tangan komisaris dan direksi (Effendi, 2009). Krus and Orowitz (2009) mengatakan pentingnya dibentuk sebuah komite yang terpisah dari komite audit dalam pengawasan risiko perusahaan. Selama ini, banyak perusahaan yang menugaskan pengawasan risiko perusahaan kepada komite auditnya. Pentingnya pengawasan risiko dan keberadaan risiko, perusahaan mungkin akan mempertimbangkan untuk membuat sebuah komite yang khusus menangani pengawasan risiko perusahaan agar berjalan secara efektif.

Dalam pembentukannya, RMC dapat tergabung dengan komite audit atau dapat pula menjadi komite yang terpisah dan berdiri sendiri. Komite terpisah yang secara khusus berfokus pada masalah risiko (RMC), dinilai dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mendukung dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam tugas pengawasan risiko dan manajemen pengendalian internal (Subramaniam, *et al.*, 2009). RMC yang terpisah dari komite audit akan lebih dapat mencurahkan lebih banyak waktu dan usaha untuk menggabungkan berbagai risiko yang dihadapi perusahaan secara luas dan mengevaluasi pengendalian terkait secara keseluruhan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Selain itu, RMC yang terpisah dari komite audit juga lebih memungkinkan dewan komisaris dalam memahami profil risiko perusahaan dengan lebih mendalam (Bates dan Leclerc, 2009). Dalam sektor perbankan, RMC disebut pula dengan Komite Pemantau Risiko. Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 salah satu prasyarat yang harus dilengkapi oleh Bank Umum yaitu tentang Penerapan GCG bagi Bank Umum adalah pembentukan Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris, yang memiliki fungsi membantu Dewan Komisaris dalam tugas pengawasan, khususnya di bidang manajemen risiko.

2.1.6 Proporsi Komisaris Independen

Dalam peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) peraturan Pencatatan Efek No 1-A: tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang bersifat Ekuitas di bursa, dalam angka 1-a menyebutkan tentang rasio komisaris independen yaitu

"komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Selanjutnya dalam angka 2 menentukan persyaratan komisaris independen yang melarang adanya hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur atau komisaris lainnya, bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi dan memahami peraturan per-undang-undangan di bidang Pasar Modal". Secara jelas menyiratkan bahwa Komisaris Independen berperan penting dalam mengawasi kebijakan dan kegiatan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pada peraturan tersebut dinyatakan adanya larangan terafiliasi dengan pemegang saham pengendali padahal belum tentu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi kontrol terhadap direksi dengan baik (Kusuma, 2004 dalam Yuliandri 2010). Oleh karenanya Komisaris Independen diperlukan sebagai upaya menjaga independensi serta menjaga agar Dewan Komisaris dapat mengontrol perusahaan secara *fair* dan tidak ter-intervensi dari salah satu pihak.

2.1.7 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Komposisi individu yang bekerja sebagai anggota dewan komisaris merupakan hal penting dalam memonitor aktivitas manajemen secara efektif (Fama dan Jensen, 1983, Sembiring, 2003, dalam Sulastini 2007). Dewan komisaris terdiri dari *inside* dan *outside director* yang akan memiliki akses informasi khusus yang berharga dan sangat membantu dewan komisaris serta menjadikannya sebagai alat efektif dalam keputusan pengendalian. Sedangkan fungsi dewan komisaris itu

sendiri adalah mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi) dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (Mulyadi, 2002).

Menurut *Good Corporate Governance* Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Ukuran dewan komisaris akan berdampak pada kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi (Subramanian, 2009).

2.1.8 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Cotter *et al.* (1998) dalam Juwitasari (2008) mengatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris merupakan sumber yang penting untuk menciptakan efektivitas dari dewan komisaris. Dewan komisaris sebagai puncak sebagai pengelolaan sistem internal perusahaan yang memiliki peran serta fungsi pengawasan, harus secara kontinu mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Dengan frekuensi rapat dewan komisaris yang jarang, maka Dewan Komisaris sangat perlu membentuk suatu badan yang memonitoring dan memberikan pelaporan pengawasan kontinu dan terperinci mengenai munculnya potensi risiko pada perusahaan. Kompleksitas yang besar dalam suatu kegiatan usaha menciptakan potensi masalah keagenan yang besar. Perusahaan memerlukan monitoring lebih luas, monitoring pengawasan internal yang lebih kuat (Raghunandan dan Rama, 2007) oleh karena itu cenderung memerlukan pengawasan melalui rapat komite atau dewan komisaris yang lebih besar (Menon dan Williams, 1994)

2.1.9 Reputasi Auditor

Auditor merupakan kunci mekanisme pengawasan eksternal dari sebuah organisasi, dan dalam beberapa tahun ini menjadi pusat perhatian bagi manajemen risiko (Subramaniam, et al., 2009). Auditor eksternal juga dapat mempengaruhi

sistem pengawasan internal klien dengan membuat rekomendasi post-audit pada peningkatan desain dari sistem (Subramaniam, et al., 2009). Kantor Akuntan Publik yang dikelompokkan sebagai *Big Four* telah terbukti dan terpercaya memberikan audit yang berkualitas dan dapat dipercaya. Auditor eksternal dengan reputasi baik cenderung untuk memilih berhubungan dengan klien yang memiliki nilai baik dalam komunitas bisnis, oleh karena itu auditor *Big Four* akan mempengaruhi klien untuk bertindak sesuai dengan praktek terbaik (Carson, 2002 dalam Andarini 2010).

Dengan pengaruh dari Auditor Eksternal yang telah terbukti kualitas dan terpercaya, perusahaan tentu berusaha untuk melakukan praktek terbaik didalam penerapan *Good Corporate Governance* bagi instansi mereka sendiri. Baik itu tata kelola manajemen, laporan keuangan, dan pengawasan mengenai risiko.

2.1.10 Risiko Pelaporan Keuangan

Perusahaan dengan proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan cenderung untuk memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi dikarenakan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam data akuntansi (Koroses dan Horvat, 2005 dalam Subramaniam et al., 2009). Dengan proporsi piutang usaha yang lebih besar maka risiko piutang tak tertagih dan piutang diragukan yang diakui dengan tidak tepat juga akan bertambah besar.

Pelaporan keuangan yang rutin merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko pelaporan keuangan dan cara *principal* memonitor kontraknya dengan *agent*. Pelaporan keuangan yang baik akan merendahkan biaya modal perusahaan karena hanya ada sedikit ketidakpastian terhadap perusahaan yang melaporkan secara luas dan dapat dipercaya, sehingga resiko investasi menjadi lebih kecil.

Pada pernyataan Koroses dan Horvat (2005) dalam Subramaniam (2009) proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan suatu perusahaan, cenderung memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi dikarenakan ketidakpastian yang tinggi dalam data akuntansi. Weston dan Brigham (1990) menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan atas piutang usaha

dan persediaan sangat berpengaruh atas risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Dengan proporsi piutang usaha yang besar maka risiko piutang tidak tertagih dan piutang diragukan yang diakui juga akan semakin besar.

2.1.11 Kompleksitas

Secara umum, kompleksitas perusahaan dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis yang dimilikinya. Kompleksitas perusahaan yang besar dapat meningkatkan risiko dalam *level* yang berbeda, termasuk risiko operasional dan teknologi, sehingga dibutuhkan mekanisme pengawasan risiko yang lebih besar (Subramaniam et al. 2009). Perusahaan dengan kompleksitas yang besar diperkirakan cenderung memiliki RMC, dengan tujuan mengecilkan risiko yang dihadapinya. Selanjutnya, RMC yang terpisah juga akan lebih dipilih oleh perusahaan dengan kompleksitas besar, karena komite yang terpisah cenderung dapat memfasilitasi kualitas pengawasan risiko yang lebih baik, baik dalam segi waktu maupun usaha dari anggotanya (Subramaniam et al. 2009).

Kompleksitas bisnis dapat dilihat dari segmen bisnis yang dimasuki oleh perusahaan. Semakin banyak segmen bisnis yang dimasuki oleh suatu perusahaan mengindikasikan semakin banyaknya departemen-departemen yang ada didalam internal perusahaan dan semakin kompleks risiko yang dihadapi perusahaan pada tingkat level yang berbeda. (Subramaniam *et al* , 2009)

2.1.12 Leverage

Leverage adalah rasio antara jumlah total hutang dengan total modal sendiri. Rasio *Leverage* menunjukkan seberapa jauh hutang digunakan untuk membiayai perusahaan. Dengan semakin besarnya rasio *Leverage* disimpulkan bahwa semakin besar perusahaan didanai oleh hutang-hutang perusahaan dan semakin banyak aktiva yang didanai dari hutang serta menunjukkan risiko perusahaan dalam pelunasan hutang tersebut. Semakin besar rasio hutang dengan *asset* atau rasio hutang dengan ekuitas, maka semakin besar risiko keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin besar risiko ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetap. Beban tetap dapat berwujud bunga

ataupun pelunasan hutang pokoknya, terlebih bila dihadapi dalam situasi perekonomian yang memburuk (Halim , 2007 dalam Yuliandri , 2010).

2.1.13 Profitabilitas

Tingkat Profitabilitas adalah indikator bagaimana perusahaan dapat menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimilikinya seperti *asset* atau ekuitas (Taures , 2010). Penelitian ini menggunakan *Net Profit Margin* dalam menghitung tingkat profitabilitas. *Net Profit Margin* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu. Dengan Aset Perusahaan yang besar, perusahaan berusaha untuk mencari laba yang lebih besar. Semakin besar aset yang dikorbankan untuk mencari laba, prinsipal tentu akan menuntut agen untuk menghasilkan laba yang setimpal dengan besarnya penggunaan aset perusahaan. Disamping itu juga risiko atas besar kecilnya penggunaan dan pemanfaatan atas aset sangat perlu untuk diperhatikan lebih jauh agar nantinya tidak mengganggu kinerja perusahaan

2.2 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang menguji mengenai pembentuk komite audit secara suka rela yang dihubungkan dengan berbagai macam Variabel Independen. Tetapi penelitian yang menguji mengenai pembentukan struktur RMC masih cukup sedikit diteliti.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Chen (2009)	Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan saham yang besar dan rasio fee non-audit dan	Kepemilikan manajerial, kepemilikan saham yang besar, rasio fee-non audit dan	hubungan antara <i>Cost of Debt</i> , ukuran dewan, ukuran perusahaan, proporsi komisaris

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Auditor eksternal terhadap Pembentukan Komite Audit Sukarela	pembentukan Komite Audit Sukarela	independen dan CEO Independen berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan komite audit secara sukarela. Andarini dan Januarti (2010) menemukan hubungan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC
2.	Subramaniam <i>et al</i> (2009)	Pengaruh CEO independen dan Ukuran Dewan yang besar Terhadap keberadaan RMC dan SRMC	CEO Independen dan Ukuran Dewan yang besar, RMC dan SRMC	CEO Independen dan Ukuran Dewan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC dan SRMC, Tetapi Kompleksitas memiliki hubungan negatif terhadap SRMC

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3	Yatim (2009)	Pengaruh proporsi komisaris independen, CEO Independen, Keahlian Dewan, dan Kerajinan Dewan terhadap RMC	Proporsi komisaris independen, CEO independen, keahlian dewan, dan kerajinan dewan	Hubungan antara ukuran perusahaan, kompleksitas operasional organisasi, dan penggunaan KAP <i>Big Four</i> memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.
4.	Setyarini (2011)	Analisis pengaruh karakteristik dewan Komisaris dan karakteristik perusahaan Terhadap pengungkapan <i>risk management Committee</i>	reputasi auditor, ukuran perusahaan , frekuensi rapat dan struktur RMC	Hasil penelitian hubungan antara reputasi auditor dan ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap struktur RMC yang bergabung dengan komite audit , sedangkan variabel frekuensi rapat dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur RMC yang terpisah dari komite audit

Chen (2009) menemukan hubungan antara *Cost of Debt*, ukuran dewan, ukuran perusahaan, proporsi komisaris independen dan CEO Independen berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan komite audit secara sukarela. Andarini dan Januarti (2010) menemukan hubungan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

Subramaniam *et al* (2009) melakukan penelitian pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Australia sebanyak 300 perusahaan tetapi sample yang

terteliti hanya sekitar 200 perusahaan yang memenuhi kualifikasi, menemukan bahwa RMC cenderung berada pada perusahaan yang memiliki CEO Independen dan Ukuran Dewan yang besar. CEO Independen dan Ukuran Dewan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC dan SRMC. Tetapi kompleksitas memiliki hubungan negatif terhadap SRMC.

Yatim (2009) menemukan bahwa semakin independen, ahli, dan rajin dewan komisaris akan cenderung untuk membentuk struktur RMC yang terpisah dan berdiri sendiri. Hubungan antara ukuran perusahaan, kompleksitas operasional organisasi, dan penggunaan KAP *Big Four* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

Setyarini (2011) menemukan hubungan antara reputasi auditor dan ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap struktur RMC yang bergabung dengan komite audit, sedangkan variabel frekuensi rapat dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur RMC yang terpisah dari komite audit.

Setiap penelitian terdahulu memiliki beberapa modifikasi dan perubahan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Subramaniam (2009) menggunakan 2 variabel dependen antara lain Keberadaan RMC dan Tipe RMC (yang tergabung atau terpisah dari komite audit) yang diuji dengan 8 variabel independen seperti : Proporsi Komisaris Independen, *CEO Duality*, Ukuran Dewan, Reputasi Auditor, Tipe Industri, Kompleksitas, Resiko Pelaporan Keuangan, dan *Leverage*. Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol.

Penelitian yang dilakukan Chen (2009) berbeda dari penelitian Subramaniam dengan melakukan modifikasi dengan menyertakan Pembentukan Komite Audit Sukarela pada Variabel Dependen dan mempertimbangkan variabel seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan saham yang besar, dan rasio fee *non-audit* dan audit auditor eksternal sebagai variabel independen.

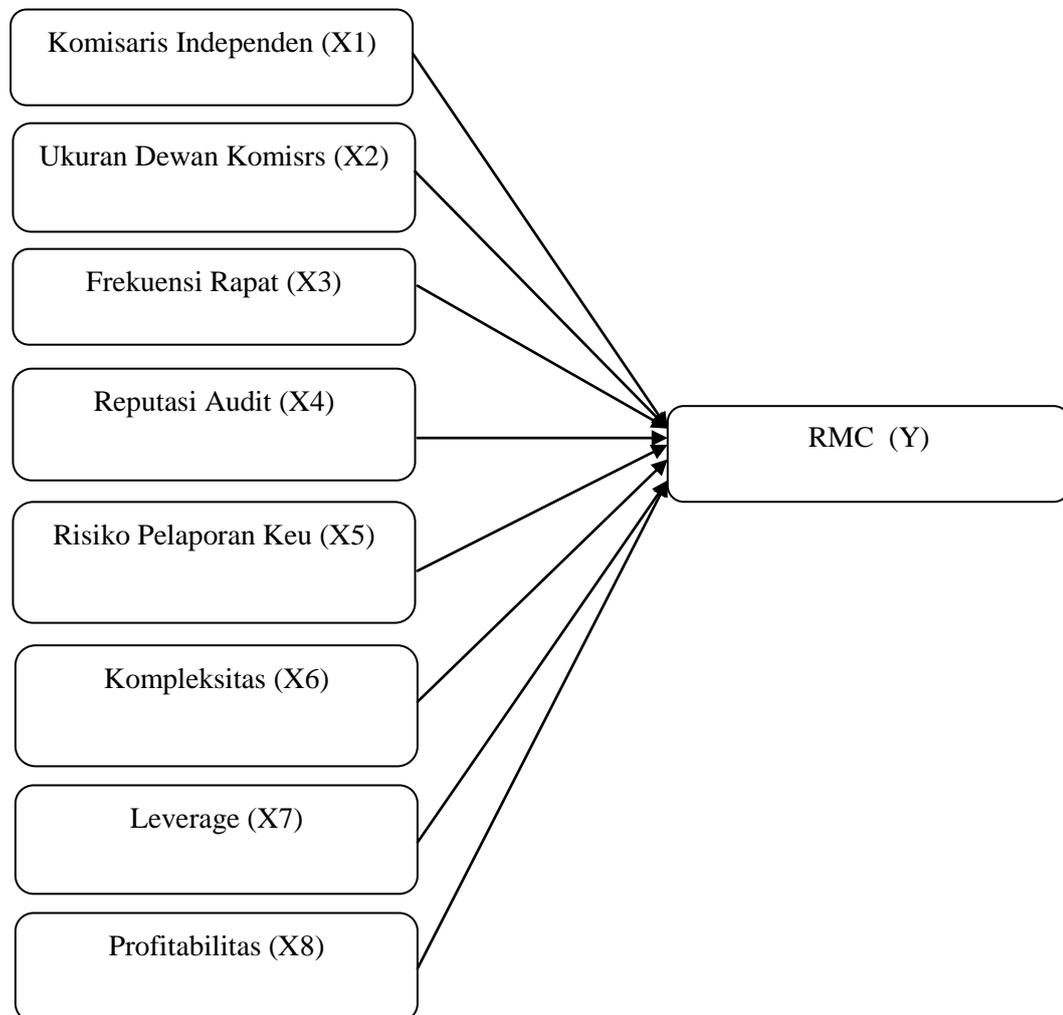
Hal berbeda dilakukan oleh Yatim yang melakukan penelitian di Malaysia tahun 2009. Yatim menggunakan 4 variabel independen seperti : proporsi komisaris independen, CEO Independen, Keahlian Dewan, dan Kerajinan Dewan. Dengan hasil bahwa Keahlian dan Kerajinan Dewan berpengaruh terhadap pembentukan RMC, berbeda dari penelitian Subramaniam (2009) yang mengatakan CEO independen dan ukuran dewan berpengaruh terhadap pembentukan RMC.

Andarini-Januarti (2010) dan Setyarini (2010) tidak berbeda jauh dari Subramaniam (2009) tetapi kedua penelitian tersebut melakukan modifikasi dengan mengurangi 2 variabel independen dari penelitian Subramaniam yaitu *CEO Duality* dan Tipe Industri. Pada penelitian yang dilakukan Andarini-Januarti variabel Ukuran Perusahaan diposisikan sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian Setyarini (2010) variabel Ukuran Perusahaan dijadikan sebagai variabel kontrol. Hasil kedua penelitian ini pun berbeda, Andarini-Januarti mengemukakan bahwa hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap pembentukan RMC dan RMC yang terpisah dari komite audit. Setyarini (2010) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan dan reputasi auditor berpengaruh terhadap pembentukan RMC, sedangkan variabel frekuensi rapat dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembentukan RMC yang terpisah dari komite audit.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menguji dampak karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap strukturisasi RMC, apakah RMC bergabung dengan komite audit atau berdiri sendiri (SRMC). Berdasarkan telaah pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan variabel Proporsi komisaris independen, Ukuran Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Reputasi Auditor, Risiko Pelaporan Keuangan, *Leverage*, Profitabilitas, dan Kompleksitas yang diduga kuat berpengaruh secara positif dalam mendorong pembentukan RMC maupun SRMC didalam perusahaan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



2.4 Bangunan Hipotesis

2.4.1 Proporsi Komisaris Independen dengan pengungkapan RMC

Proporsi dewan komisaris dapat dikatakan sebagai indikator independensi dewan dari manajemen. Kehadiran komisaris independen dalam dewan dapat menambah kualitas aktivitas pengawasan dalam perusahaan, karena mereka tidak terafiliasi dengan perusahaan sebagai pegawai, dan hal ini merupakan keterwakilan independen dari kepentingan *shareholders*.

Independensi merupakan point penting didalam penerapan *Good Corporate Governance*. Proporsi komisaris independen menjadi indikator

independensi sebuah dewan. Tentunya proporsi komisaris independen harus mencapai ukuran yang ideal agar kualitas keputusan dan kebijakan yang diambil dapat berkualitas dan komisaris independen juga tidak menerima tekanan psikologis dari komisaris *non*-independen. Sebuah dewan dengan komisaris independen yang tinggi cenderung menyediakan sebuah pengawasan yang lebih besar pada aktivitas manajemen risiko perusahaan (Yatim, 2009).

Dengan proporsi komisaris independen yang lebih besar, risiko yang berpotensi terjadi dan muncul pada masa yang akan datang menjadi lebih ketat dan diawasi secara mendetail dan dengan terbentuknya sebuah RMC yang berpisah dari komite audit, pengawasan dan pelaporan atas risiko-risiko yang nantinya akan terjadi menjadi lebih terkendali.

Bersumber dari penelitian yang dilakukan Yatim (2009) memberikan hasil bahwa proporsi komisaris independen yang besar cenderung membentuk RMC yang berdiri sendiri dan terpisah dari komite audit untuk meningkatkan kemampuan monitoring mereka terhadap perusahaan. Hasil Pengujian hipotesis (Setyarini, 2011) mengenai pengaruh proporsi komisaris independen terhadap keberadaan RMC dan SRMC menunjukkan hubungan positif, Hasil ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen signifikan terhadap keberadaan RMC dan SRMC.

Alasan yang dapat diberikan terhadap hasil uji tersebut yaitu walaupun di Indonesia sudah ada peraturan mengenai ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota komisaris namun permasalahan yang terjadi dalam penegakan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia yaitu komisaris sebagai pengawas, termasuk komisaris independen diangkat oleh pemegang saham mayoritas dan akibatnya independensi menjadi kurang baik. Dalam hal ini, padahal komisaris independen mempunyai peran khusus pada keberadaan komite di dalam perusahaan (Alijoyo dan Zaini 2004).

Komisaris independen seharusnya diangkat oleh pihak yang independen (bukan oleh pemegang saham mayoritas). Hilangnya independensi komisaris dalam pengambilan keputusan, khususnya tentang pembentukan komite baru akan dapat

menghilangkan objektivitasnya dalam mengambil keputusan tersebut. Selain itu, ketentuan dewan komisaris independen sebesar 30% mungkin belum cukup tinggi untuk menyebabkan para komisaris independen tersebut dapat mendominasi kebijakan perusahaan (Gusnadi dan Budiharto, 2008).

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H1: Proporsi Komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan RMC

2.4.2 Ukuran Dewan Komisaris dengan pengungkapan RMC

Ukuran dewan yang besar mungkin berhubungan dengan keberadaan struktur RMC. Ukuran dewan yang besar cenderung memberikan sumber daya yang besar bagi dewan komisaris (Subramaniam , 2009). Ukuran dewan yang besar juga memberikan kekuatan didalam fungsi pengawasan bahwa dewan memerlukan informasi yang lebih rinci dan mendalam mengenai potensi-potensi risiko yang dihadapi.

Jumlah dewan yang besar dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Keuntungan dari jumlah dewan yang besar dalam suatu perusahaan salah satunya yaitu perusahaan tergantung pada dewan untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Semakin besar kebutuhan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan dewan dalam jumlah yang besar semakin tinggi (Wardhani, 2006). Kerugian jumlah dewan yang besar dapat meningkatkan permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi. Permasalahan tersebut dapat menurunkan kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga dapat menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol (Wardhani, 2006).

Oleh karena itu, akan lebih mudah bagi dewan komisaris membentuk RMC, dan tingkat sumber daya yang ditawarkan oleh ukuran dewan yang besar akan membuat dewan komisaris lebih menyukai dibentuknya RMC yang berdiri sendiri atau tidak bergabung dengan komite audit. Hal ini juga didukung dengan hasil

penelitian Subramaniam, *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa ukuran dewan berhubungan positif dengan keberadaan RMC.

Hasil penelitian (Setyarini, 2011) yang menyatakan bahwa ukuran dewan tidak berhubungan signifikan terhadap keberadaan RMC dan SRMC karena ukuran dewan yang besar tidak menjamin terbentuknya komite baru secara sukarela disebabkan dengan makin besar ukuran dewan maka tugas pengawasan sudah dapat dilakukan oleh dewan komisaris itu sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan, dengan banyaknya sumber daya yang dimiliki dewan komisaris, semakin rendah tuntutan untuk membentuk RMC gabungan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H2 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan RMC

2.4.3 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dengan Pengungkapan RMC

Cotter *et al.* (1998) dalam Juwitasari (2008) mengatakan bahwa frekuensi *meeting* Dewan Komisaris merupakan sumber yang penting untuk menciptakan efektivitas dari Dewan Komisaris. Fokus dan perhatian penelitian ini pada *meeting* dewan adalah tepat mengingat frekuensi *meeting* dewan secara potensial akan meningkatkan komunikasi antara direksi dan fungsi internal *control* (seperti RMC) dan menjadikan dewan lebih efektif dalam tugas pengawasannya. Frekuensi dari *meeting* dewan menjadikan sebuah dewan lebih aktif (Raghunandan dan Rama dalam Yatim, (2009).

Hasil penelitian (Setyarini, 2011) mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yatim (2009) yang menyatakan bahwa dewan komisaris yang menyelenggarakan *meeting* lebih sering cenderung untuk meningkatkan tingkat pengawasan manajemen risiko. Selain itu, semakin rajin suatu dewan maka akan mendukung program manajemen risiko formal termasuk pembentukan RMC yang berdiri sendiri guna membantu pengawasan lingkungan perusahaan yang lebih efektif.

Intensitas aktivitas dewan, seperti frekuensi meeting ini dapat memberikan kontribusi dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen terhadap berbagai kepentingannya, yang mungkin saja ada suatu tindakan yang dapat merugikan bagi perusahaan maupun *principal*. Pertemuan dewan yang diadakan lebih sering akan memperlihatkan bahwa anggota dewan tersebut terlihat lebih rajin dan hal itu akan menguntungkan bagi *shareholders*. *Meeting* dewan juga merupakan suatu sumber daya dalam meningkatkan keefektifan dari dewan. Oleh karena itu, semakin sering anggota dewan menyelenggarakan rapat, maka akan dapat mendukung terbentuknya suatu komite baru yaitu RMC.

Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H3 : Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan RMC

2.4.4 Reputasi Auditor dengan pengungkapan RMC

Auditor merupakan suatu mekanisme pengawasan eksternal terhadap perusahaan dan menjadi sorotan bagi manajemen risiko. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tergabung dalam kelompok KAP *BigFour*, senantiasa mendorong klien untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal mereka (Cohen, 2004). Hal ini mendorong perusahaan untuk membentuk suatu komite baru. Komite ini akan lebih memberikan perhatian pada pengelolaan risiko misalnya RMC. Hal ini termotivasi untuk melindungi reputasi dan menjaga kualitas audit yang telah dilaksanakan oleh KAP *BigFour*. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Yatim (2009) yang menyatakan perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh auditor *BigFour* cenderung membentuk RMC yang berdiri sendiri.

Auditor Big Four dipandang memiliki reputasi baik. Secara umum akan memberikan panduan kepada kliennya mengenai praktek *corporate governance* terbaik, khususnya mengenai pembentukan RMC (Chen, *et al.*, 2009). Hal ini dimotivasi oleh kebutuhan akan pemeliharaan kualitas audit dan perlindungan akan reputasi mereka (Subramaniam *et al.*, 2009). Terdapat tekanan yang lebih besar pada perusahaan yang diaudit *Big Four* untuk membentuk RMC,

dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit *non-Big Four*. Adanya RMC dipandang sebagai dukungan tambahan ketika auditor sedang menilai sistem monitoring risiko internal, mereka lebih memilih untuk meminimalisasi kerugian reputasi dengan kegagalan audit (Subramaniam, *et al.*, 2009). Dibanding dengan komite gabungan, RMC terpisah akan lebih dipilih oleh *Big Four*, karena cenderung dapat meningkatkan kualitas dari penilaian dan pengawasan risiko.

Perusahaan yang diaudit oleh auditor *Big Four* menyediakan kualitas audit yang lebih baik dan semakin baik kualitas auditor eksternal maka semakin baik pula kualitas penerapan GCG di dalam perusahaan khususnya pembentukan RMC. Namun hasil penelitian (Setyarini, 2011) menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor *Big Four* tidak terbukti untuk membentuk RMC yang berdiri sendiri. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yatim (2009) yang menyatakan bahwa reputasi auditor berhubungan positif terhadap pembentukan RMC. Perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh auditor *Big Four* cenderung untuk membentuk RMC karena auditor *Big Four* menyediakan kualitas audit yang lebih baik. Karena auditor *Big Four* memiliki reputasi yang lebih baik maka mereka mungkin membutuhkan perusahaan untuk memiliki sistem pengawasan internal yang baik, seperti pembentukan RMC.

Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H4 : Reputasi Auditor berpengaruh terhadap pengungkapan RMC

2.4.5 Risiko Pelaporan Keuangan dengan pengungkapan RMC

Proporsi Aset yang besar pada piutang usaha dan persediaan pada perusahaan cenderung memberikan risiko yang tinggi karena ketidakpastian data akuntansi. Hal ini mendorong untuk dibentuknya suatu komite yang nantinya memberikan pengawasan lebih terperinci dan lebih baik atas risiko-risiko didalamnya.

Risiko pelaporan keuangan dapat diminimalkan dengan penerapan teori agensi yang sesuai dengan keadaan perusahaan. Teori agensi memposisikan konflik antara *principal* dan *agent* dapat diredakan dengan pelaporan keuangan. Perusahaan dengan proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan cenderung memerlukan risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi, karena tingginya ketidakpastian dalam data akuntansi (Korosec dan Horvat, 2005). Piutang usaha dan persediaan dapat menimbulkan kesalahan penilaian ketika proporsinya semakin besar dalam aset. Potensi kesalahan perhitungan yang besar ini menimbulkan risiko pelaporan yang tinggi. Oleh karena itu, keberadaan RMC, khususnya RMC yang terpisah akan dapat memfasilitasi perusahaan dengan kualitas pengawasan risiko pelaporan keuangan yang lebih baik (Subramaniam, *et al.*, 2009). RMC yang terpisah dianggap dapat menghasilkan kinerja yang lebih efektif dalam pengawasan risiko.

Alasan yang mendasari hasil (Setyarini, 2011) tersebut yaitu dengan proporsi piutang dan persediaan yang lebih besar maka risiko pelaporan keuangan juga akan meningkat, namun hal ini tidak menyebabkan terbentuknya suatu komite pengawas yang baru, karena komite audit dan auditor internal lebih berperan dalam memastikan penilaian piutang dan persediaan (Andarini dan Januarti, 2010). Dalam mengawasi laporan keuangan komite audit harus memastikan bahwa manajemen memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi keuangan perusahaan, sedangkan auditor internal bertanggung jawab dalam menjaga kekayaan perusahaan.

Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H5 : Risiko Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan RMC

2.4.6 Kompleksitas dengan Pengungkapan RMC

Kompleksitas dari suatu perusahaan dapat dilihat dari segmen bisnis yang dimasuki oleh perusahaan. Kompleksitas yang besar mempertinggi risiko pada tingkat level yang berbeda (Setyarini, 2011). Makin besar segmen bisnis

perusahaan memerlukan penanganan mekanisme manajemen risiko yang semakin efektif dan hal ini mendorong RMC menjadi suatu hal mutlak yang harus dilaksanakan. Yatim (2009) membuktikan bahwa kompleksitas dari segmen bisnis perusahaan memerlukan pengawasan yang lebih besar berfokus pada upaya untuk mengurangi risiko tersebut

Pengujian hipotesis (Setyarini, 2011) mengenai pengaruh kompleksitas terhadap keberadaan RMC dan SRMC menunjukkan hubungan negatif, Hasil ini menunjukkan bahwa kompleksitas tidak signifikan terhadap keberadaan RMC dan SRMC. Alasan yang mendasari adalah mungkin saja perusahaan yang hanya memiliki satu segmen bisnis/usaha saja dapat memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki banyak segmen usaha. Hal ini dikarenakan mungkin saja perusahaan yang hanya bergerak dalam satu segmen usaha memiliki anak perusahaan yang tersebar luas dalam wilayah tertentu sehingga risiko yang dihadapi juga semakin kompleks.

Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H6 : Kompleksitas berpengaruh terhadap pengungkapan RMC

2.4.7 Leverage dengan pengungkapan RMC

Leverage adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Perusahaan dengan leverage yang tinggi akan membuat keadaan keuangan perusahaan menjadi memburuk, hal ini disebabkan semakin besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, jadi semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan. Dengan adanya risiko tersebut tentu pembentukan RMC akan menjadi mekanisme yang penting dalam mengawasi risiko tersebut, dan lebih jauh, RMC yang berdiri sendiri akan menjadikan fungsi pengawasan risiko lebih efektif. Hal ini sebagai suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja manajemen, karena suatu tingkat *leverage* yang tinggi akan berdampak negatif terhadap para pemegang saham selaku *principal*. Apalagi jika

perusahaan tersebut mengalami likuidasi yang mengharuskan membayar semua hutang perusahaan terlebih dahulu dibandingkan mengembalikan seluruh aset yang telah ditanamkan oleh *principal*.

Perusahaan dengan leverage yang tinggi cenderung memiliki biaya agensi yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan tingginya risiko keuangan yang harus dihadapi. Perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung untuk memiliki risiko going concern yang tinggi (Subramaniam, *et al.*, 2009). Terkait dengan fungsi pengawasan, kreditor sebagai pihak pemberi hutang cenderung menuntut perusahaan untuk memiliki pengendalian internal yang lebih baik. Konsekuensinya, perusahaan dengan leverage tinggi akan memiliki tuntutan kuat untuk membentuk RMC dengan tujuan mengawasi risiko going concern tersebut. RMC yang terpisah cenderung dapat berfungsi dengan lebih efektif dalam pengawasan risiko.

Pengujian hipotesis (Setyarini, 2011) mengenai pengaruh *leverage* terhadap keberadaan RMC dan SRMC pada model regresi I menunjukkan hubungan positif sedangkan pada model regresi II menunjukkan hubungan negatif dengan nilai, Hasil ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak signifikan terhadap keberadaan RMC dan SRMC. Alasan yang mendasari hasil uji ini yaitu perusahaan yang mempunyai hutang yang tinggi maka akan diawasi oleh kreditor secara lebih ketat. Hal ini mengakibatkan perusahaan kurang memperhatikan pelaksanaan GCG yang baik, khususnya mengenai pembentukan komite baru. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yatim (2009) dan Andarini dan Januarti (2010) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berhubungan terhadap keberadaan RMC maupun SRMC yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan hutang tinggi cenderung hati-hati dalam melakukan aktivitasnya dan berusaha mengurangi aktivitas yang sifatnya tidak optimal.

Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H7 : *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan RMC

2.4.8 Profitabilitas dengan pengungkapan RMC

Tingkat profitabilitas menunjukkan keberhasilan atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan profitabilitas yang rendah akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak. (Taures , 2011). Hal ini dikarenakan rendahnya profitabilitas mengindikasikan tingginya risiko yang dihadapi oleh perusahaan (Barry dan Brown , 1986 ; Prodhon dan Harris , 1989 dalam Aljifri dan Hussainey, 2007). Dengan besarnya Aset yang dimiliki oleh perusahaan, perusahaan terdorong untuk mencari tingkat profitabilitas tinggi karena didukung oleh besar aset yang dimiliki. Konsekuensinya, akan timbul risiko–risiko atas aset yang besar pada perusahaan sehingga perusahaan pun berusaha untuk lebih luas mengungkapkan risiko yang dihadapi dan mendorong dibentuknya suatu komite yang baru.

Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H8 : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan RMC